



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1822-1828

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana (Studi Kasus Kekeringan Di Desa Ridogalih Kec Cibarusah Kab Bekasi)

Cut Nilawangsa^{1✉}, Gili Argenti², Rachmat Ramdani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: cnilawangsa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengenai penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ridogalih dan pihak swasta dalam menanggulangi bencana kekeringan untuk meminimalisir kekurangannya air bersih di desa ridogalih. yang kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menanggulangi kekeringan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kolaborasi di Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus yaitu penentuan partisipan penelitian dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio-visual, serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilihat dari kondisi awal, Desain kelembagaan, Kepemimpinan dan proses kolaboratif. keseluruhannya belum dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci : *Kolaborasi, Bencana, Desa Ridogalih*

Abstract

This Research is about disaster management carried out by the ridogalih village government and the private sector in tackling drought disasters to minimize the shortage of clean water in ridogalih village. Which then raises the question of how collaboration is carried out by the government, the private sector and the community to overcome drought. The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of collaboration in ridogalih village, cibarusah district, bekasi regency. The research uses a qualitative method and a case study approach, namely the determination of research participants using a purposive sampling technique, collecting data using observation, interviews, documentation and audio-visual materials, as well as data analysis using data reduction, data Presentation and drawing conclusions. The research result are seen from the initial conditions, instutisional design, leadership and collaborative processes. as a whole has not been implemented optimally.

Keywords: *Collaborative, Disaster, Ridogalih Village*

PENDAHULUAN

Bencana alam adalah suatu keadaan yang dapat dialami oleh setiap manusia kejadian yang terjadi pada daerah tertentu ada yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri adapula yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Salah satunya bencana yang disebabkan Salah satunya bencana yang di sebabkan oleh perbuatan manusia dengan melakukan merusak lingkungan, mengambil sumber daya secara besar-besaran, dan tidak melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 1815 - 2013 bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan. Bencana-bencana ini sering terjadi diberbagai daerah di indonesia, baik di musim penghujan maupun musim kemarau.

Indonesia dengan kontur alam yang basah masih memiliki indeks kelangkaan air yang terbilang tinggi, bahkan tidak sedikit daerah-daerah yang mengalami krisis air ketika musim kemarau tiba. Kekeringan yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari ketersediaan sumber air di suatu daerah, ketika suatu daerah tidak mempunyai sumber air baku dari mata air maka hanya mempunyai sumber air hujan, sungai dan resapan kondisi seperti ini sangat rentan terhadap perubahan iklim. Bencana kekeringan adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat dimana kebutuhan air tetap atau bahkan meningkat akan tetapi persediaan atau cadangan air tanah menurun sehingga ketersediaan air tidak dapat mencukupi kebutuhan harian masyarakat, (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2007).

Kekeringan juga dapat menjadi bencana alam apabila menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkan. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan pada penanganan resiko kekeringan antara lain tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan darurat (UU No. 24, 2007).

Sadar Indonesia menjadi wilayah rawan bencana, pemerintah indonesia mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana atas dasar itulah pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulangi bencana. BPNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun (2008) tentang Penanggulangan Bencana. Air mempunyai peranan yang sangat strategis dan harus tetap tersedia jumlahnya, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia, makhluk lainnya dan pelaksanaan pembangunan di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi suatu masyarakat tertentu menjadi suatu acuan dalam menentukan apakah masyarakat disuatu lokasi atau desa sudah terpenuhi atau belum. Dalam rantai kehidupan, air merupakan hal yang sangat penting kebutuhan air akan meningkat dari waktu ke

waktu, hal ini bukan hanya di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk melainkan juga digunakan untuk kegiatan industri, pertanian dan perikanan. Ancaman kekeringan yang menyebabkan krisis air tersebut juga terjadi di beberapa wilayah di pulau Jawa dan memiliki tingkat resiko bencana kekeringan yang paling besar dibandingkan dengan pulau lainnya khususnya pulau Jawa bagian barat. Jawa Barat karena Jawa Barat memiliki curah hujan yang beragam ada tinggi, sedang maupun rendah, khususnya daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang bagian utara, Cirebon, Indramayu. Memiliki curah hujan rendah hal ini memungkinkan seringnya kabupaten tersebut mengalami kekeringan karena hanya dapat mengandalkan air sungai, hujan dan air resapan.

Lokasi Prioritas Nasional untuk Bencana Kekeringan

Table 1. Jumlah Provinsi Prioritas Kekeringan

Provinsi Kekeringan	Prioritas	
Jawa Barat		40.502.281 Jiwa Terpapar
Jawa Timur		30.834.619 Jiwa Terpapar
Sumatera Utara		2.493.861 Jiwa Terpapar
Kalimantan Barat		3.715.771 Jiwa Terpapar
Sumatera Barat		4.653.672 Jiwa Terpapar
Jawa Tengah		30.468.131 Jiwa Terpapar
Nusa Tenggara Timur		4.495.622 Jiwa Terpapar
Banten		9.198.933 Jiwa Terpapar
Kalimantan Selatan		2.324.853 Jiwa Terpapar
Nusa Tenggara Barat		265.578 Jiwa Terpapar

Sumber : BNPB, 2015-2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kekeringan menjadi bencana yang terjadi di setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia dan karena itulah setiap warga negara harus selalu waspada dalam segala bentuk bencana yang terjadi. Dari data di atas Jawa Barat tertinggi yang mengalami kekeringan dengan jumlah 40. 502.281 jiwa terpapar kesulitan air bersih atau krisis air, maka dibutuhkan penanggulangan yang baik untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kekeringan, apabila kekeringan tidak ditanggulangi dengan baik dan benar maka akan menyebabkan kerugian secara material maupun non material. Bencana ini sudah sepatutnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak baik masyarakat maupun

pemerintah, karena dampak yang diakibatkan sangat merugikan masyarakat. Tetapi hingga kini, air bersih yang disediakan untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa persoalan dan permasalahan yang begitu kompleks dan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi karena masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih.

Tabel 2. Jumlah daerah kecamatan yang sering terjadi kekeringan di kabupaten Bekasi

No	Jumlah daerah kecamatan yang sering terjadi kekeringan di kabupaten Bekasi
1	Kecamatan Cibarusah
2	Kecamatan Bojong Mangu
3	Kecamatan Setu
4	Kecamatan Serang baru
5	Kecamatan Babelan
6	Kecamatan Taruma Jaya
7	Kecamatan Muara Gembong
8	Kecamatan Cikarang Pusat

Sumber : Diolah Peneliti 2023

Berdasarkan Data Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi memiliki potensi krisis air yang terjadi setiap tahunnya pada musim kemarau mendatang di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Cibarusah merupakan salah satu kecamatan yang mengalami krisis air di Kabupaten Bekasi khususnya Desa Ridogalih dengan Total Jumlah Penduduk 10.336 jiwa. Menurut Pemerintah Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini berada disebelah timur Jakarta berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten ini memiliki 23 kecamatan yang dibagi atas Desa dan Kelurahan suku aslinya yaitu suku Sunda. Berdasarkan letak geografisnya Bekasi di berbagai wilayahnya adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit-bukit, 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada pada ketinggian 0-25 meter diatas permukaan air laut. Bekasi memiliki curah hujan rendah hal ini menyebabkan seringnya kabupaten tersebut mengalami kekeringan karena hanya dapat mengandalkan air sungai, hujan dan air resapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berusaha menggali suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui proses Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam menanggulangi bencana kekeringan di

Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Terdapat 7 informan dalam penelitian ini, meliputi Kepala Desa Ridogalih, 1 Aparatur Desa, 2 Pihak Swasta, 3 Masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan empat teknik yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual (Cresswell, 2016:254). Analisis data yang digunakan menurut Miles Huberman (1984) dalam Sugiyono (2018:247) terbagi dalam tiga bagian yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ridogalih merupakan salah satu daerah yang sejak lama sering mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada musim kemarau tiba masyarakat akan kebingungan untuk mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketersediaan air disuatu wilayah utamanya dipengaruhi oleh tiga komponen, (1) adanya sumber daya air yang memadai, (2) adanya kebijakan dan kelembagaan yang memadai untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, (3) Adanya infrastruktur untuk penyediaan air.

Pemerintah daerah maupun pemerintah desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh mendapatkan air bersih apabila pemerintah serius dalam memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, kewajiban pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum adalah salah satu karakteristik negara termasuk dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya kebutuhan pangan, sandang dan papan saja, tetapi masyarakat dikatakan sejahtera jika dapat hidup jauh lebih sehat dengan adanya sumber daya alam yang tersedia dengan baik. Salah satunya terpenuhi sumber daya yang penting bagi makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena air sebagai kebutuhan primer bagi manusia.

Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menanggulangi bencana kekeringan menggunakan teori Ansell and Gash (Dr. La Ode Syaiful Islamy, 2018). (a) Kondisi Awal (b) Desain Kelembagaan (c) Kepemimpinan (d) Proses Kolaboratif.

Kondisi awal, kondisi yang hadir pada awal kolaborasi dapat berupa memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara para pemangku kepentingan antara lembaga dan pemegang saham. Stakeholder para pemangku kepentingan memiliki visi bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi dan bentuk upacara desa ridogalih untuk menanggulangi bencana kekeringan bersama dengan pihak swasta dan masyarakat. Ketika memasuki musim kemarau biasanya para pemerintah dan pihak swasta yang terkait berkerjasama dalam memberikan droping air ke desa ridogalih, para masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menanggulangi bencana kekeringan saling berbagi ketika ada bantuan droping air agar terbagi secara merata.

Desain Kelembagaan, dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Karena di desa ridogalih ini cukup banyak pihak swasta yang memberikan bantuan dropping air maka berbeda-beda ada pihak swasta yang memberikan anggaran untuk pemerintah desa yang mengelolanya, dan ada juga pihak swasta yang langsung mengelola memberikan bantuan air pemerintah desa hanya sebagai pendamping saja, aturan dasar hukum pemerintah dengan pihak swasta saling memberikan kepercayaan.

Kepemimpinan Fasilitatif, peran kepemimpinan fasilitatif begitu penting dalam membangun kepercayaan dan komitmen bukan hanya kepihak-pihak yang sepaham tetapi juga kepihak-pihak yang bertentangan. Jika pemimpin tidak mampu berperan sebagai pendistribusi komitmen dan kepercayaan akan berdampak pada bercerai berai dan bergerak sendiri-sendiri para stakeholder sehingga akan membuat proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Kepemimpinan bergerak dalam menggali nilai-nilai kemanfaatan bersama untuk dapat mencapai komitmen sehingga kepemimpinan yang ada harus mampu mendorong, menggerakkan, memfasilitasi, dan memberdayakan stakeholder lainnya.

Proses Kolaborasi merupakan suatu proses dimana di dalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama dan proses inilah yang paling utama dalam terjadinya kolaborasi pemerintahan. Kolaborasi dengan melakukan tatap muka tetapi setelah berjalannya waktu karena sudah saling mempercayai pihak swasta dan pemerintah desa bisa melalui media sosial dalam melakukan proses kolaborasi. Pemerintah memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi.

SIMPULAN

Kolaborasi dalam Bencana kekeringan yang terjadi di Indonesia khususnya daerah Bekasi yang telah melanda banyak kecamatan dan desa yang mengalami kekeringan, pengelolaan air bersih di Bekasi dihadapkan dengan berbagai persoalan, terutama jika dikaitkan dengan masalah kependudukan, masalah distribusi yang tidak merata lebih mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk pada daerah tertentu yang melebihi daya dukung lingkungannya. Pemukiman desa ridogalih sampai saat ini masih ada beberapa kampung yang belum terjangkau air bersih, belum masuknya pipa saluran air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi, Jika masuknya PDAM pun tidak semua warga mampu membayar saluran air bersih karena masih banyak warga sana yang tergolong tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Islamy, La Ode. S. (2018). *Collaborative Governance*. Bau Bau : Deep publish

J.W Creswell (2016). Reasch Desain : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 4 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 27 Tahun 2012 Tentang Dana Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana